BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan

Dunn (2000: 51-52) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) yang dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie,* yang berarti menangani masalah - masalah publik atau administrasi pemerintahan. Lasswell dan Kaplan (dalam Thoha, 1999:71) memberikan definisi tentang kebijakan yaitu sebagai program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah *projected program of goal, value and practices*).

Menurut Anderson (1979) dalam Winarno (2002:16) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu : (1) titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik, (2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat, (3) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah bukan yang diinginkan oleh pemerintah.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional